

Partisipasi PPTRA dalam Pameran Rakornas IG 2018



Stand PPTRA di Pameran BIG

Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) Tahun 2018 mengambil tema Percepatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Rakornas IG dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2018 di Hotel Borobudur Jakarta. Rakornas IG dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro, Kepala BIG, pejabat struktural BIG dan Kementerian/Lembaga (K/L) serta diikuti oleh peserta yang terdiri dari K/L penyelenggara IG, pemerintah daerah, akademisi dan pakar IG, serta para pelaku industri IG.

Pada Rakornas IG 2018 tersebut juga digelar pameran produk dan layanan jasa yang terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial. Pameran ini diikuti oleh K/L penyelenggara IG, pemerintah daerah serta para pelaku industri IG. Badan Informasi Geospasial (BIG) menyajikan informasi produk dan jasanya yang terbagi menjadi informasi geospasial dasar, informasi geospasial tematik, dan infrastruktur informasi geospasial.

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) turut berpartisipasi mengisi pameran dengan menyajikan produk tata ruang, dinamika sumberdaya, atlas, dan jasa asistensi supervisi tata ruang. Produk yang dipamerkan yaitu Atlas Junior, Atlas Taktual, e-Atlas, aplikasi status tata ruang, dokumen pemetaan Tanjunglesung, Newsletter, dan majalah Geotangkas serta hasil kegiatan pemetaan tematik lainnya. PPTRA juga menampilkan proses pelaksanaan asistensi peta tata ruang mulai dari permohonan asistensi sampai pada penerbitan rekomendasi dari BIG. Untuk produk dan jasa lain yang dipamerkan dapat dilihat oleh pengunjung secara online di alamat <http://www.big.go.id/geospatial-e-book/>, <https://atlas.big.go.id/> dan <http://tataruang.big.go.id/>.

Kesempatan untuk mengisi pameran tersebut telah dimanfaatkan dengan baik oleh PPTRA. Perhatian yang tinggi tercermin dari antusias para peserta untuk mendapatkan produk tersebut atau bertanya terkait informasi geospasial yang ada di PPTRA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga mengapresiasi dengan baik adanya pameran ini dan sempat bertanya terkait atlas taktual dan pelaksanaan asistensi tata ruang. Pameran ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan publik terkait produk dan jasa yang dihasilkan oleh PPTRA. [I Made Dipta, 2018]



Menko Perekonomian Mencoba Peta Taktual

PROGRES ASISTENSI & SUPERVISI PETA TATA RUANG

Rapat Pleno Periode Maret 2018



Pleno Peta RDTR Teras Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah 06-03-2018



Pleno Peta RTRW Kab. Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur 08-03-2018



Pleno Peta RDTR Sindang Jaya Kab. Tangerang, Provinsi Banten 13-03-2018



Pleno Peta RDTR Singaparna Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat 13-03-2018



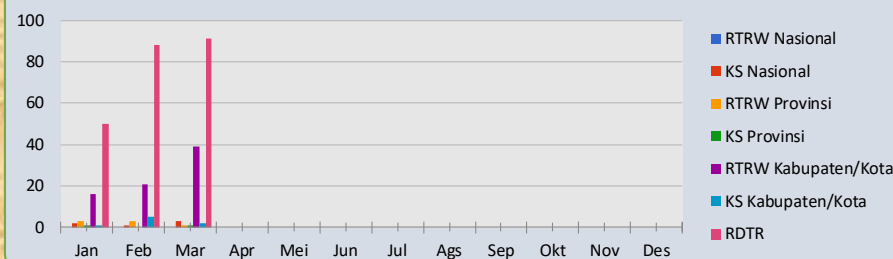
Pleno Peta RDTR Singosari Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur 26-03-2018



Pleno Peta RDTR Lasusua Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Utara 26-03-2018

Progres Asistensi dan Supervisi Periode Januari - Maret 2018

Konsultasi Peta Rencana Tata Ruang 2018



Rekomendasi Peta RTR pada Tahun 2018

Peta RDTR = 15 Rekomendasi RDTR
 Peta RTRW Kab/Kota = 3 Rekomendasi
 Peta RTRW Provinsi = 2 Rekomendasi
 Peta KSN = 1 Rekomendasi

Asistensi Peta RTR	Jan	Feb	Mar	Total
RTRW Nasional	0	0	0	0
KS Nasional	2	1	3	6
RTRW Provinsi	3	3	1	7
KS Provinsi	1	0	1	2
RTRW Kabupaten/Kota	16	21	39	76
KS Kabupaten/Kota	1	5	2	8
RDTR	50	88	91	229
Jumlah	73	118	137	328

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
 Gedung F Lantai 2
 Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
 Fax - PPTRA : (021) 8764613
 Email : redaksi.pttra@gmail.com
 Twitter : @pptra_big
<http://big.go.id/newsletter/>



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS

Dalam acara pembukaan Rakornas Informasi Geospasial, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyinggung tentang kendala penyelesaian tata ruang akibat kelangkaan peta dasar skala besar. Menurutnya, hanya 40 RDTR yang sudah selesai (sudah terbit Perda) dari total sekitar 1.800 RDTR yang disusun pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini sebenarnya diluar ranah BIG karena penyelesaian perda terkait unsur politis dan sosial. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Tengah, belum satupun perda diterbitkan meskipun sudah lebih dari 20 peta RDTR telah mendapatkan rekomendasi BIG. Peraturan gubernur tentang RDTR yang belum keluar karena belum adanya persetujuan anggota DPRD. Demikian pula di Provinsi Jawa Timur, BIG sudah merekomendasikan sekitar 60 peta RDTR, namun baru 23 Perda yang selesai. Jadi, terbitnya Perda RDTR bukan hanya terkait masalah perpetaan namun juga terkait pada proses penyelesaian Perda di level provinsi. Ketersediaan CSRT (Citra Satelit Resolusi Tinggi) untuk beberapa wilayah dapat dijadikan modal untuk penyelesaian peta RDTR. Saat ini, sekitar 750 peta RDTR sedang dalam proses asistensi di BIG dan kemungkinan akan segera dipercepat proses rekomendasinya.

Perlu dipahami bahwa surat rekomendasi BIG hanyalah satu dari sekitar 14 persyaratan untuk proses persetujuan substansi Kementerian ATR/BPN. Meskipun demikian, BIG secara institusional harus memperhatikan lambatnya penyelesaian perda tata ruang tersebut. Jika Perda tidak segera disahkan, maka dinamika perkembangan wilayah akan mempengaruhi perubahan batas deliniasi pola ruang dan struktur ruang yang ada. Oleh karena itu, program percepatan penyelesaian rekomendasi peta tata ruang oleh BIG tetap harus dilakukan. Penyediaan peta dasar dan informasi geospasial dasar serta pengawalan peta tematik



Kebutuhan peta dasar skala besar di masa mendatang adalah mutlak. Hal ini terkait akan kebutuhan peta perencanaan skala besar untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Peran data dan informasi geospasial tak hanya sebagai model untuk menggambarkan substansi rencana dalam bentuk spasial, namun juga sebagai data masukan dalam proses penyusunan rencana. Semakin detail rencananya, maka tuntutan skala peta juga semakin besar.

Peta perencanaan skala besar menuntut kedetailan obyek-obyek yang harus digambarkan. Aspek ketepatan posisi dan geometris sangat diperlukan. Perbedaan akurasi dan presisi ini akan menjadi masalah ketika proses sinkronisasi dilakukan pada peta perencanaan detail dengan skala besar. Sebagai contoh, koordinasi rencana detail tata ruang dengan aspek kepemilikan tanah menuntut adanya koordinasi dan sinkronisasi antara peta RDTR dengan peta persil kepemilikan tanah pada skala 1:5.000 dan skala 1:1.000. RDTR sebaiknya sudah mempertimbangkan aspek status kepemilikan tanah pada penyusunan rencana. Permasalahan lainnya adalah sinkronisasi dengan peta pajak bumi dan bangunan yang juga pada skala 1:1.000. Kondisi ini tidak hanya membutuhkan penyediaan

dan aspek kartografis pada album peta menjadi langkah riil untuk menjamin produk peta tata ruang yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kami tidak terpengaruh jika sementara ada pihak yang memandang lambatnya Perda tata ruang terkait dengan masalah konsultasi perpetaan. Bahkan, muncul penafsiran bahwa konsultasi tata ruang ke BIG hanya untuk menanyakan status peta dasar sehingga berita acara penyerahan peta dasar saja sudah cukup sebagai bukti bahwa tata ruang sudah konsultasi ke BIG. Padahal, merujuk amanah PP 8/2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, semua hal terkait pemetaan tata ruang wajib dikonsultasikan ke BIG. Apabila hanya berbekal berita acara penyerahan peta dasar saja, menandakan mereka tidak paham akan kaidah dan peran peta dalam penyusunan tata ruang. Hal ini harusnya yang dipahami oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota. Selamat membaca. [Mulyanto Darmawan, 2018]



Menko Perekonomian di Stand Pameran BIG

peta dasar skala besar secara cepat, namun juga penyiapan seperangkat standar dan aturan teknisnya.

Dalam Rakornas IG tanggal 21 Maret 2018, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pentingnya penyediaan peta skala besar untuk RDTR. Hal ini menjadi kewajiban BIG untuk menjawab tantangan tersebut. Saat ini, data untuk RDTR masih mengandalkan ketersediaan citra satelit resolusi tinggi. Kendala yang dihadapi masih cukup besar, baik aspek teknis maupun non teknis. Aspek teknis erat kaitannya dengan tutupan awan dan tidak adanya data ketinggian dari citra optis. Hal ini menyebabkan peta RDTR hanya digambarkan dalam bentuk dua dimensi saja. Pemetaan dengan foto udara, Lidar atau Airborne IFSAR akan membutuhkan waktu akuisisi dan pengolahan yang relatif lama. Dengan demikian, menjadi tantangan BIG untuk merealisasikan kebijakan satu peta skala besar yang cukup kompleks, mulai dari koordinasi, sinkronisasi, serta penyusunan standar dan aturan teknis yang lengkap. [Ryan Pribadi, 2018]



REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
 | Editor: Mulyanto Darmawan, Fakhruddin Mustofa, Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Randhi Atiqi, Chintia Dewi |
 | Desain Tata Letak: Ika Rosalika |

TINDAK LANJUT PERJANJIAN KERJASAMA BIG - KEMENDIKBUD

Menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara BIG dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2018, maka diselenggarakanlah kegiatan *technical workshop* Penyusunan Peta dan Atlas untuk peserta didik SMP. Kegiatan ilmiah ini berlangsung di Hotel Mega Angrek, Jakarta pada tanggal 7-9 Maret 2018. Pihak BIG dimotori oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, sedangkan Kemendikbud diwakili oleh Direktorat Pembinaan SMP. Kegiatan ini juga merupakan bagian penting hasil masukan ilmiah dari 70 instruktur nasional Kurikulum 2013 pada acara *Workshop* Peralatan Alat Pembelajaran IPS SMP yang terselenggara tanggal 5-8 Desember 2017.

Kegiatan *technical workshop* Penyusunan Peta dan Atlas untuk peserta didik SMP ini bertujuan menghasilkan peta dan atlas pendidikan sebagai media penunjang pembelajaran yang berkualitas sesuai standar dan kaidah pemetaan yang baik serta sesuai Kurikulum 2013, khususnya untuk peserta didik SMP. Ke depan diharapkan melalui peta dan atlas pendidikan ini, peserta didik SMP mempunyai dan meningkat kecerdasan spasialnya, serta memahami wilayah dan mencintai Indonesia secara lebih nyata.

Hasil yang akan dicapai berupa 17 Peta Tematik untuk Pendidikan dan 2 Atlas Pendidikan (tema wilayah dan sejarah). Produk informasi geospasial tematik sektor Pendidikan tersebut tergolong sebagai produk strategis IG karena sifatnya yang dapat langsung digunakan dan dimanfaatkan oleh para peserta didik melalui pembelajaran di kelas. Melalui media visualisasi berbentuk peta dan atlas sebagai bentuk dukungan media pembelajaran diharapkan dapat membantu mempercepat penyerapan mata pelajaran, khususnya IPS dan mata pelajaran terkait lainnya. [Adinda Cempaka, 2018]



Pengecekan Peta Pendidikan

REKOMENDASI PETA RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) JANTUNG KALIMANTAN

Kalimantan merupakan paru-paru dunia karena terdapat hutan tropis di bentang alam bagian tengah pulau. Ratusan ribu hektar wilayah hutan menjadi tempat hidup satwa dan bermacam-macam vegetasi/flora yang khas, penyedia oksigen untuk kehidupan. Tak salah bila wilayah ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jantung Kalimantan dengan tujuan utama menjaga kelestarian alam. BIG aktif dalam mendukung KSN Jantung Kalimantan melalui asistensi dan supervisi peta rencana tata ruang sesuai dengan aturan amanah UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan PP No 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Sinergi yang aktif dalam aspek pemetaan antara Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas dan Direktorat Perencanaan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN yang menangani KSN, berbuah rekomendasi peta RTR KSN Jantung Kalimantan.

Proses asistensi dan supervisi untuk peta RTR KSN Jantung Kalimantan mulai dilakukan bulan Juni 2016 hingga akhir

2017. Proses pemeriksaan peta oleh tim teknis BIG dilakukan secara intensif. Di sisi lain Kementerian ATR/BPN juga secara aktif berdiskusi tentang aspek keruangan ini, tidak sebatas pada KSN Jantung Kalimantan, tetapi juga bersamaan verifikasi KSN wilayah lain. Pengecekan peta mengikuti *flowchart* pemeriksaan Peta RTR pada umumnya yaitu sumber data harus mengacu pada Peta Rupabumi dari Badan Informasi Geospasial, hingga pengecekan akhir berupa album peta. Untuk KSN Jantung Kalimantan ini memang sedikit unik dan berbeda dengan RTR yang biasa disupervisi. Hal ini karena KSN memiliki keunikan dan karakter wilayah yang khas, berbeda antara KSN satu dengan yang lain. Salah satu yang membedakan adalah jenis peta tematik serta klasifikasi peta rencananya dengan menyesuaikan kebutuhannya. Namun meskipun demikian, tetap mengacu pada pedoman penyusunan KSN yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor/15/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Setelah melalui pembahasan intensif maka pada Maret 2018, BIG mengeluarkan surat rekomendasi Peta RTR KSN Jantung Kalimantan. Saat ini progres KSN Jantung Kalimantan menuju proses pengesahan menjadi Peraturan Presiden dan saat ini berada di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia bersamaan dengan proses-proses pleno dengan K/L lainnya. Harapannya, Peraturan Presiden yang mengatur KSN di tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat segera disahkan. Payung hukum ini bernilai strategis, baik dari segi lingkungan maupun aspek lokasi KSN Jantung Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. [Chintia Dewi, 2018]



Pleno KSN Jantung Kalimantan



KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBINAAN IGT NERACA SUMBERDAYA ALAM

Salah satu tugas pokok Kedeputusan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah pembinaan kepada penyelenggara IGT dan pengguna Informasi Geospasial (IG). Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) sebagai bagian dari Kedeputusan IGT melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan menyelenggarakan Pembinaan Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam.

Kegiatan koordinasi di Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018 ini dilakukan untuk menyiapkan dokumen pembinaan berupa penyusunan draft Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Integrasi Neraca Spasial Sumber Daya Alam. NSPK Integrasi Neraca Spasial Sumberdaya Alam ini menetapkan metode dan konsep keilmuan yang mendasari kegiatan integrasi antar komponen ataupun seluruh elemen sumberdaya lahan, air, hutan serta mineral dan batubara. Integrasi dilakukan secara spasial maupun secara deskriptif dan statistik dengan melihat keterkaitan antar sumberdaya.

Penyusunan *draft* NSPK Integrasi Neraca Spasial Sumber Daya Alam ini bekerjasama dengan PUSPICS (Pusat Pendidikan Interpretasi Citra dan Survei Terpadu), Fakultas Geografi UGM. Dokumen NSPK ini diharapkan dapat membantu penyelenggara IGT khususnya pemerintah daerah dalam menyusun Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah. [Setiyani, 2018]



Kegiatan Koordinasi NSPK

PPTRA BIG MENGIKUTI TRAINING ON MACROECONOMY INDICATORS



Foto Bersama Kegiatan Training

Pembangunan nasional tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun harus memperhatikan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Indonesia sebagai negara yang memanfaatkan sumberdaya tentu saja memberikan dampak terhadap lingkungan sehingga perhitungan kekayaan nasional perlu diperluas dengan memperhatikan deplesi sumberdaya dan kerusakan lingkungan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi sumber daya alam Indonesia. Salah satunya, Sejak tahun 1997, Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) telah menyusun publikasi tahunan Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi Terpadu (SISNERLING) yang sesuai dengan *System of Environmental and Economic Accounting* (SEEA) Tahun 1993. Indonesia bergabung dengan WAVES tahun 2013 dengan harapan bahwa pendekatan *System of National Accounts* (SNA) dapat diimplementasikan dalam Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RPJMN) untuk mendukung pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) mengirimkan stafnya mengikuti

Training on Macroeconomy Indicators yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan *Wealth Accounting and The Valuation of Ecosystem Services* (WAVES), Bank Dunia pada 6-9 Maret 2018 di Jakarta. Pelatihan ini diikuti oleh beberapa Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan kekayaan negara antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Informasi Geospasial.

Pelatihan ini meliputi beberapa materi antara lain konsep dasar *National Accounts*, indikator-indikator makroekonomi, *Natural Capital Accounting*, dan SEEA. Pada akhir pelatihan juga membahas lebih detail mengenai data dan kondisi Indonesia serta implikasi terhadap penyusunan kebijakan. Mayoritas materi mengacu pada SEEA yang merupakan pengembangan dari SNA terbitan *World Bank*. SEEA dikembangkan untuk mengakomodir pengaruh lingkungan terhadap keberlangsungan suatu perekonomian.

Perhitungan kekayaan negara penting dilakukan sehingga perlu pemahaman mengenai ketersediaan dan mengidentifikasi kesenjangan data yang ada. Selama ini beberapa Kementerian/Lembaga telah melakukan penyusunan neraca yang bermanfaat untuk menghitung kekayaan negara sehingga dukungan data dan informasi dari walidata sangat diperlukan untuk perhitungan kekayaan negara yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, BIG berperan dalam penyajian kekayaan nasional yang komprehensif akan lebih bermakna apabila dilengkapi dengan ketersediaan informasi geospasial sebagai masukan dalam perhitungan kekayaan nasional. [Roswidyatmoko Dwihatmojo, 2018]

ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN Kasus di Sebagian Pesisir Pemalang

Peranan penting dalam pengelolaan wilayah yaitu adanya penentuan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan. Berbagai potensi alam yang dimiliki dan dapat dikembangkan di wilayah pesisir masih memiliki berbagai macam permasalahan, dimana permasalahan tersebut merupakan indikasi bahwa pengembangan dan pemanfaatan potensi di wilayah pesisir belum optimal. Buku ini dihadirkan sebagai salah satu referensi penentuan arahan dalam pengembangan kawasan pesisir, khususnya di wilayah sebagian pesisir Pemalang.

Pada bagian awal, buku ini menyajikan pembahasan mengenai kondisi eksisting di Kabupaten Pemalang dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Pemalang. Selanjutnya disampaikan bahasan tentang analisis sumber daya lahan serta zona kepelepasan berbasis sumber daya lahan. Pada bagian akhir disampaikan pula bahasan mengenai elemen risiko bencana di pesisir dan arahan pengembangan kawasan pesisir.

Beberapa hal yang telah disampaikan dalam buku ini diharapkan dapat membantu para pemangku kebijakan dalam menetapkan arahan pengembangan wilayah pesisir, khususnya di wilayah sebagian pesisir Pemalang. Diharapkan potensi yang ada di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, namun tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan sustainabilitas dalam pelaksanaan pembangunan. [Adinda Cempaka, 2018]



Judul Buku : Arah Pengembangan Kawasan
Penyusun : Dyah Rahmawati Hizbaron, Muhs Aris Marfat
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Hal : xviii + 240 Halaman

Klinik Asistensi dan Supervisi untuk Percepatan Penyelesaian Peta RDTR & RTRW di Provinsi Jawa Barat



Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc. Dalam sambutannya, beliau menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu strategi efisiensi untuk mempercepat proses penyelesaian peta. Harapannya, kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa namun juga terlaksana di Pulau Sulawesi dan Sumatera. Pemerintah daerah dan provinsi pun menyambut kegiatan ini dengan sangat antusias serta penuh apresiasi.

Dalam rangka percepatan penyelesaian peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota/Provinsi, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG kembali melakukan 'jemput bola' dengan mendatangi pemerintah daerah untuk klinik asistensi dan supervisi. Kali ini, kegiatan klinik dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tiga kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, PPIDS ITB, serta perwakilan pemda yang menangani RDTR dan RTRW se-Provinsi Jawa Barat. Tim BIG terdiri atas 10 orang personil dimana masing-masing melakukan asistensi dan supervisi pada tiga kabupaten/kota.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini terbagi menjadi klinik asistensi dan supervisi RDTR pada hari pertama dan RTRW Kabupaten/Kota/Provinsi pada hari kedua. Inti dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan status capaian penyusunan Peta RTR, yang memiliki bobot dari 1 hingga 8. Hingga saat ini, jumlah rekomendasi di Provinsi Jawa Barat belum terlalu banyak. Hal itu tidak selaras dengan catatan pertemuan asistensinya yang membludak tiap pekannya. Oleh karena itu, diharapkan Peta RDTR dan RTRW yang sudah mencapai status 4 (selesai peta dasar) dapat melakukan asistensi intensif untuk penyelesaian hingga mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi ini nantinya akan digunakan sebagai syarat persub dan pengesahan perda. [Chintia Dewi, 2018]



Foto Bersama Klinik Asistensi di Prov. Jawa Barat